

**ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)  
KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2019**

**ANALYSIS OF CITY/ DISTRICT GENDER DEVELOPMENT INDEX IN  
EAST JAVA PROVINCE 2017-2019**

**Afrilia Nur Aini**

Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5  
Kota Malang , Jawa Timur, Indonesia.  
e-mail: aprilianuraini85@gmail.com

Diserahkan: 24/02/2021; Diperbaiki: 12/05/2021; Disetujui: 06/06/2021

DOI: 10.47441/jkp.v16i1.147

**Abstrak**

Pentingnya pembangunan manusia yang diarahkan untuk mengedepankan kualitas SDM tanpa membedakan gender agar terwujud kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2018 berada pada level menengah ke atas. Namun disparitas pembangunan manusia masih terjadi pada tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan terhadap IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif data panel dengan model analisis *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil regresi penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPG. Serta variabel tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPG dengan nilai probabilitas sebesar 0,0004. Sedangkan hasil regresi menunjukkan bahwa nilai *Sig-F-Statistic* sebesar 0,000000 yang artinya secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap IPG. Hasil regresi *R-Squared* sebesar 0,997691 yang artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 99,76%.

**Kata Kunci: Indeks Pembangunan Gender, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan**

**Abstract**

*The quality of human resources is very important in human development, regardless of gender, so that people's welfare can be realized. The Gender Development Index (IPG) of East Java Province in 2010-2018 is at the upper-middle level. However, disparities in human development still occur at the district/city level. This study aims to determine how much influence government spending on education and health, economic growth and poverty levels have on the GPI in East Java Province. This study uses a quantitative approach through panel data using the FEM analysis model. The results of the regression showed that the variables of government expenditure in the fields of education and health had a negative and insignificant effect. While the economic growth variable has a positive and insignificant effect, and the poverty level variable has a positive and significant effect on GPA with a probability value of 0.0004. The value of Sig-F-Statistic is 0.000000, which means that simultaneously the independent variables affect GPA. The result of R-Squared regression is 0.997691, which means that the independent variable can explain the dependent variable of 99.76%.*

**Keywords: Gender Development Index, Economic Growth, Poverty.**



## PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara salah satunya dapat dilihat dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, namun selain itu juga mencakup pada kualitas sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia merupakan agen dalam pembangunan, sehingga pentingnya dilakukan pembangunan manusia yang diarahkan untuk mengedepankan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan jenis kelamin tertentu agar terwujud kesejahteraan masyarakat. Kaitan antara gender dan pembangunan telah menjadi topik yang semakin diperdebatkan di lingkungan politik dan ekonomi. Indonesia dalam mencapai target pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs pada tahun 2012 melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro. Dalam mencapai SDGs ditargetkan dapat tercapai dalam 15 tahun atau di tahun 2030 (UNDP 2020). Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai secara global adalah kesetaraan gender, dimana laki-laki dan perempuan bersama-sama terlibat dalam pembangunan.

Berdasarkan "*United Nations Human Development Report*" yang dirilis UNDP pada tahun 1990, salah satu faktor penting dalam pembangunan manusia adalah pertumbuhan ekonomi, dengan mengutamakan kesetaraan gender maka pertumbuhan ekonomi dapat terdistribusi secara adil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990. IPM merupakan indeks untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan komponen dasar meliputi kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak. UNDP juga memperkenalkan indeks untuk mengukur perkembangan gender di suatu wilayah yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah rasio antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG terdiri dari komponen kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak, sama dengan komponen IPM. Harapan hidup mewakili kesehatan, tingkat melek huruf dan rata-rata waktu pendidikan mewakili pengetahuan, dan kontribusi pendapatan berdasarkan jenis kelamin mewakili ekonomi. Perbedaannya, IPM hanya mengukur capaian pembangunan manusia di seluruh wilayah. Namun, IPG dapat menjelaskan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Kesenjangan pembangunan gender masih terjadi antara berbagai wilayah di Indonesia, dan perbedaan pembangunan di wilayah timur dan barat sangat terlihat. Dari segi sumber daya manusia, potensi wilayah serta karakteristik lainnya. Hal ini menunjukkan belum adanya pemerataan pembangunan manusia berbasis gender yang berlawanan dengan tujuan pembangunan di Indonesia, yakni adanya pemerataan hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh penduduk (Azuri, Zulhanif, dan Pontoh 2016). Tahun 2019, 5 besar provinsi dengan IPG tertinggi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, hanya terjadi perubahan pada peringkatnya saja. Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 menduduki peringkat teratas dengan nilai IPG sebesar 0,26. Sedangkan DI Yogyakarta dan DKI Jakarta pada tahun 2018 menduduki peringkat kedua dan ketiga, pada tahun 2019 naik menjadi peringkat pertama dan kedua. Sumatera Barat dan Bali berada pada peringkat yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 (Kemenppa 2020).

Pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) pada setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan. PUG bertujuan untuk memberi perempuan kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan. Pelaksanaan PUG di era otonomi daerah, memberikan tantangan dan peluangnya semakin besar. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kepentingan perempuan dan laki-laki agar kedua pihak dapat menikmati hasil pembangunan secara seimbang. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur PUG sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan. Secara khusus, pengaturan mengenai

PUG terdapat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dikeluarkannya Inpres ini menjadi tonggak awal pelaksanaan PUG di Indonesia (Martiany 2011). Penguatan kelembagaan PUG menjadi salah satu komponen penting dalam mengawal proses pembangunan kesetaraan gender. Melalui penguatan kelembagaan PUG agar mencapai kesetaraan gender dan terpenuhi hak-hak anak dalam pembangunan (Ismail, Yulyana, dan Priyanti 2020).

**Tabel 1. IPG, IPM, dan Peringkat Lima Provinsi Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Jenis Kelamin, 2018-2019**

Provinsi	IPG		IPM Laki-laki		IPM Perempuan		Peringkat IPG	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
IPG Tertinggi tahun 2019								
DI Yogyakarta	94,73	94,77	82,34	82,8	78	78,47	3	2
DKI Jakarta	94,7	94,71	83,28	83,58	78,87	79,16	2	3
Sulawesi Utara	94,79	94,53	75,4	76,36	71,47	72,18	1	1
Sumatera Barat	94,17	94,09	75,12	75,81	70,74	71,33	4	4
Bali	93,71	93,72	78	78,63	73,03	73,69	5	5
IPG Terendah tahun 2018								
Papua	80,11	80,05	64,45	66,38	52,43	53,14	1	1
Papua Barat	82,47	82,47	71,54	72,47	59	59,96	2	2
Kalimantan Timur	85,63	85,98	80,82	81,58	69,21	70,14	3	3
Kalimantan Barat	86,74	86,81	71,78	72,48	62,26	62,92	6	4
Gorontalo	86,63	86,83	70,52	71,29	61,49	61,9	4	5

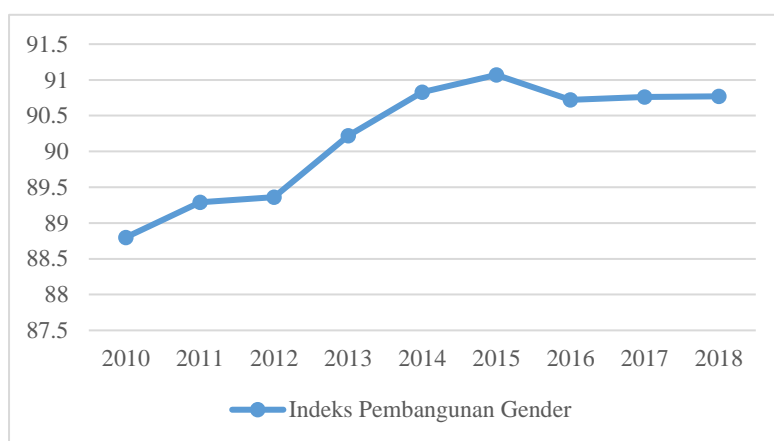
*Sumber: BPS 2018-2019*

Berdasarkan perhitungan IPG, Provinsi Jawa Timur masih menempati urutan kelima dari enam provinsi di Pulau Jawa. IPG tertinggi DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan disusul Jawa Tengah (Rahmawati dan Hidayah 2020). Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terpadat kedua setelah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 39 juta jiwa pada tahun 2018. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur meningkat sebesar 5,50 % pada tahun 2018 dan mencapai 5,52 % pada tahun 2019. Dari tahun 2015 hingga 2018, proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Jawa Timur menurun sebesar 8,19 % pada 2015 dan turun lagi menjadi 7,06 % pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dan strategi mengatasi kesenjangan gender dalam akses kerja dan pengentasan kemiskinan perempuan dengan penerapan kesetaraan kesempatan kerja berjalan optimal. Ketidaksetaraan gender akan berdampak negatif terhadap aspek ekonomi, sosial, hingga pertahanan, dan keamanan negara.

Secara umum konsep kemiskinan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Kebutuhan dasar minimum didefinisikan menjadi indikator keuangan yang dinyatakan dalam uang. Nilai kebutuhan minimum akan kebutuhan dasar disebut juga dengan garis kemiskinan. Masyarakat yang penghasilannya di bawah garis kemiskinan digolongkan miskin. Kemiskinan relatif disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan, dan kebijakan pembangunan ini gagal mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat, membuat satu orang lebih miskin dari yang lain. Hal ini terjadi ketika terjadi ketimpangan antar kelompok pendapatan (Bappenas 2018). Kemiskinan merupakan kondisi dimana ketidakmampuan pada ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, ditandai dengan rendahnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Provinsi Jawa Timur meraih 27 trofi penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan sebagai salah satu dari 4 provinsi peraih APE 2018 kategori Mentor. Adanya

capaian tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur mengarahkan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi upaya mendorong dan penghapusan kesenjangan gender. Salah satu strategi pembangunan Provinsi Jawa Timur merupakan pengarusutamaan gender yang tertuang pada Pergub Jatim Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Selain itu, optimalisasi peran perempuan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan hingga fasilitas sarana dan prasarana. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa pencapaian IPG pada Provinsi Jawa Timur tinggi. IPG di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2018 masih berada dalam kategori medium ke bawah. Pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama 9 tahun terakhir pada Gambar 1 Perkembangan IPG Jawa Timur 2010-2018 telah meningkat 88,80 tahun 2010 menjadi 90,77 pada tahun 2018. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena peningkatan beberapa indikator IPG mencakup kesehatan, pendidikan dan hidup yang layak.



**Gambar 1. Perkembangan IPG Jawa Timur Tahun 2010-2018**  
(Sumber: Badan Pusat Statistik 2020)

Berdasarkan pencapaian IPG di Provinsi Jawa Timur yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan terhadap IPG di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan terhadap IPG di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan rentang waktu penelitian 2017-2019. Variabel independen yaitu pendidikan dan kesehatan (PPPK), pertumbuhan ekonomi (*growth*), dan tingkat kemiskinan (*poverty*) terhadap pengeluaran pemerintah. Sedangkan variabel dependen yaitu IPG kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kajian ini menggunakan model ekonometri persamaan linier berganda dengan data panel. Data tersebut merupakan kombinasi *cross-section* dari 38 daerah/kota di Jawa Timur dari tahun 2017 sampai 2019 menggunakan *software Eviews*. Perkiraan model dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, hal pertama yang dilakukan adalah menggunakan metode FEM untuk melakukan regresi data panel. Dalam mengestimasi parameter model data panel teknik yang digunakan FEM, dasar pemikiran pembentukan model tersebut adalah terdapat beberapa variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model memungkinkan adanya *intercept* yang tidak konstan. Atau dengan kata lain, *intercept* ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu (Munandar 2017). Indeks *i* menunjukkan bahwa intersep dari bagian unit berbeda. Perbedaan ini disebabkan fungsi khusus dari masing-masing unit *cross-section*. Selain itu, diterapkan pula teknik variabel *dummy* sehingga dapat dilihat persamaan baru. Dengan menggunakan FEM, intersep setiap variabel diperbaiki. FEM mengasumsikan intersep ( $\alpha$ ) dan slope ( $\beta$ ) akan sama atau konstan. Hasil regresi dengan menggunakan FEM adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Regresi FEM**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PPPK	0.006210	0.010798	1.549082	0.5670
GROWTH	-0.071748	0.039681	-1.905981	0.0747
PROVERTY	-0.137278	0.037105	-3.103162	0.0004
C	91.96617	0.591018	188.1779	0.0000
R2= 0.997691		F-Stat= 788.6769		Sig F-Stat= 0.000000

Sumber: Hasil regresi data panel dengan software Eviews.

Pada saat mengestimasi data panel melalui metode FEM, variabel *dummy* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Cara untuk mengatasi masalah tersebut, menggunakan variabel residual atau metode *Random Effect Model* (REM). Dalam REM, diasumsikan bahwa variabel kesalahan berhubungan dengan orang yang sama pada periode yang berbeda. Estimasi parameter dalam REM dilakukan dengan *Generalized Least Square* (GLS) dengan galat atau error diasumsikan acak/random (Ilyas 2012). Adapun hasil dari regresi dengan menggunakan REM adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Regresi REM**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PPPK	92.38351	0.748926	123.3547	0.0000
GROWTH	0.008436	0.010738	0.785611	0.4338
PROVERTY	-0.049587	0.039331	-1.260756	0.2101
C	-0.193020	0.034957	-5.521605	0.0000
R2= 0.221054		F-Stat= 10.40547		Sig F-Stat= 0.000004

Sumber: Hasil regresi data panel dengan software Eviews.

Pemilihan model data panel dilakukan dengan pengujian *Hausman*. Statistik uji *Hausman* mengikuti distribusi *chi-kuadrat*, dan jumlah variabel bebas (*k*) adalah derajat kebebasan. Tabel 4 menunjukkan hasil regresi data panel dengan uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0001, lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yaitu 0.05. Sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, maka model FEM lebih baik dari pada REM.

**Tabel 4. Hasil Regresi Uji Hausman**

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	20.685673	3	0.0001

Sumber: Hasil regresi data panel dengan software eviews

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

Ho = *Random Effect Model*

H1 = *Fixed Effect Model*

### Pengujian Pelanggaran Asumsi Klasik

Langkah selanjutnya, setelah pemilihan metode dari hasil regresi data panel Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, maka model yang terpilih adalah *FEM*. Perlu dilakukan beberapa pengujian terhadap pelanggaran asumsi klasik yaitu sebagai berikut:

#### Multikolinieritas

Multikolinieritas dapat didefinisikan sebagai hubungan yang tepat antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas atau independen, karena penting untuk memastikan bahwa variabel bebas yang berhubungan dengan variabel terikat tidak berhubungan dengan variabel terikat lainnya. Multikolinieritas dapat menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) atau nilai toleransi. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka dapat disimpulkan terjadi multikolinieritas, dan sebaliknya. (Kahang, Saleh, and Suharto 2017). Hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 5 menunjukkan bahwa tidak ada nilai korelasi yang tinggi antara variabel independen tidak lebih dari 0,90. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terdeteksi masalah multikolinieritas antar variabel independen.

**Tabel 5. Hasil Regresi Uji Multikolinieritas**

	<i>PPPK</i>	<i>GROWTH</i>	<i>PROVERTY</i>
<i>PPPK</i>	1.000000	-0.137422	0.172847
<i>GROWTH</i>	-0.137422	1.000000	-0.581141
<i>PROVERTY</i>	0.172847	-0.581141	1.000000

Sumber: Hasil regresi data panel dengan software eviews.

#### Heterokedastisitas

Dalam penelitian ini menggunakan data panel diperlukan uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan membandingkan jumlah kuadrat residual pada metode OLS dengan SSR pada GLS. Jika nilai SSR lebih kecil dari nilai OLS maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 6. Hasil Regresi Pengujian Heteroskedastisitas**

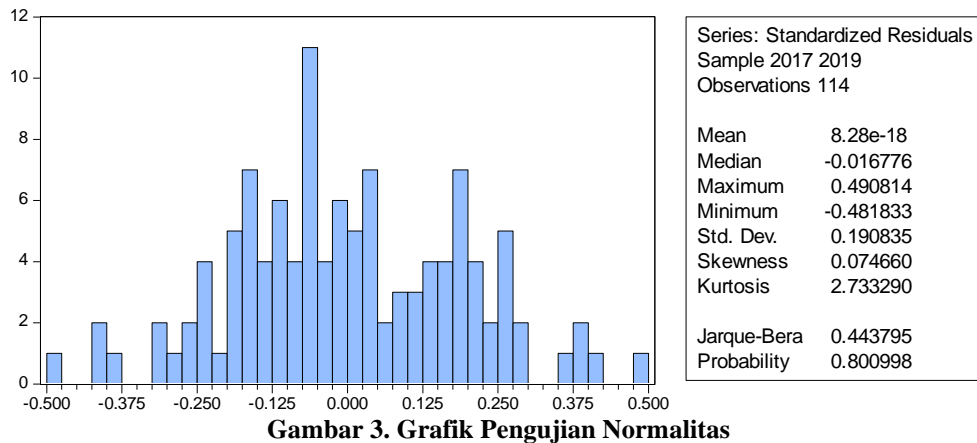
<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>C</i>	-0.177297	0.256456	-0.691335	0.4915
<i>PPPK</i>	0.006326	0.004686	1.350034	0.1812
<i>GROWTH</i>	0.002810	0.017219	0.163208	0.8708
<i>PROVERTY</i>	0.001627	0.016101	0.101051	0.9198

Sumber: Hasil regresi data panel dengan software eviews.

Tabel 6 menunjukkan probabilitas pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan  $> \alpha = 0.05$ , maka model di atas tidak terdeteksi masalah heteroskedastisitas.

### Normalitas

Dalam pengujian asumsi klasik normalitas digunakan dalam menentukan data yang telah dikumpulkan, apakah berdistribusi normal atau diperoleh dari populasi normal. Salah satu cara untuk menguji normalitas data adalah *Jarque-Bera*, yaitu uji *Goodness-of-Fit* untuk mengukur apakah *Skewness* dan *Kurtosis* sampel berdistribusi dengan benar. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik Pengujian Normalitas

Sumber: Hasil regresi data panel dengan software eviews.

Dari gambar grafik hasil uji normalitas di atas, diketahui bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 0.443795 dengan p value sebesar 0.800998 dimana  $> \alpha = 0.05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal.

### Hasil Uji Hipotesa

Setelah menentukan model yang tepat, yaitu dengan menggunakan *FEM* dan telah dilakukan pengujian pelanggaran asumsi klasik. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Berikut adalah persamaan regresi data panel menggunakan *FEM* sebagai berikut:

$$IPG_{it} = 91.96617 + 0.006210 PPPK - 0.071748 GROWTH - 0.137278 PROVERTY + u$$

Nilai *Coefficient* setiap variabel menunjukkan nilai parameternya atau besar pengaruh kenaikan setiap variabel bebas secara parsial. Jika tiap variabel bebas tersebut mengalami kenaikan 1 satuan. Sedangkan tanda positif atau negatif dalam *Coefficient* tersebut menunjukkan arah. Jika positif maka tandanya searah, artinya jika variabel tersebut naik, maka variabel dependen akan naik dengan asumsi variabel lainnya bersifat konstan.

Jika selisih setiap variabel independen adalah 1 satuan, maka bagian nilai koefisien dari setiap variabel tersebut menampilkan nilai parameter atau pengaruh peningkatan dari setiap variabel independen. Sedangkan tanda positif atau negatif pada koefisien menunjukkan arah. Jika bertanda positif searah, artinya jika variabel meningkat maka variabel dependen akan meningkat dengan premis bahwa variabel lainnya konstan. Berikut nilai koefisien variabelnya:

- 1) **C (Constant)** = 91,81144, menunjukkan bahwa besarnya perkiraan peningkatan IPG (dalam satuan) jika nilai variabel PPPK, GROWTH, dan POVERTY adalah nol.
- 2) **PPPK** = 0,006210, menunjukkan bahwa jika variabel PPPK meningkat sebesar 1%, dengan asumsi bahwa variabel GROWTH dan POVERTY dianggap konstan maka diperkirakan IPG akan meningkat sebesar 0,006210%.

- 3) **GROWTH** =  $-0.071748$  menunjukkan bahwa jika variabel GROWTH naik 1%, maka diperkirakan IPG akan mengalami penurunan sebesar 0.071748 % dengan asumsi variabel PPPK dan POVERTY dianggap konstant.
- 4) **POVERTY** =  $-0.137278$  menunjukkan bahwa jika variabel POVERTY naik 1%, maka diperkirakan nilai IPG akan mengalami penurunan sebesar 0.137278% dengan asumsi variabel PPPK dan GROWTH dianggap konstan.

**Uji t (Uji Parsial)**

Uji-t dilakukan untuk menentukan apakah variabel independen, yaitu pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan, memiliki pengaruh parsial terhadap variabel dependen (yaitu IPG), dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat kesalahan ( $\alpha = 0,05$ ) diperoleh sebesar  $\pm 1.69092$ . berdasarkan hasil pengujian regresi data panel hasil uji t adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji t (Uji Parsial) Dalam Penelitian**

No.	Variabel	t-stat	Prob	Kesimpulan
1.	PPPK	1.549082	0.5670	H0 diterima
2.	GROWTH	-1.905981	0.0747	H0 ditolak
3.	PROVERTY	-3.103162	0.0004	H0 ditolak

Sumber: Hasil regresi data panel dengan software Eviews.

Berdasarkan hasil Uji t (Uji Parsial) dapat diketahui bahwa (1) variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan Kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPG; (2) variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap IPG; dan (3) variabel tingkat kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap IPG.

**Uji F (Uji Simultan)**

Pengujian F atau uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (yaitu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan) secara bersama-sama (sekaligus) berdampak pada variabel dependen (IPG). Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai Sig-F-Statistic sebesar 0,000000 jauh lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel IPG.

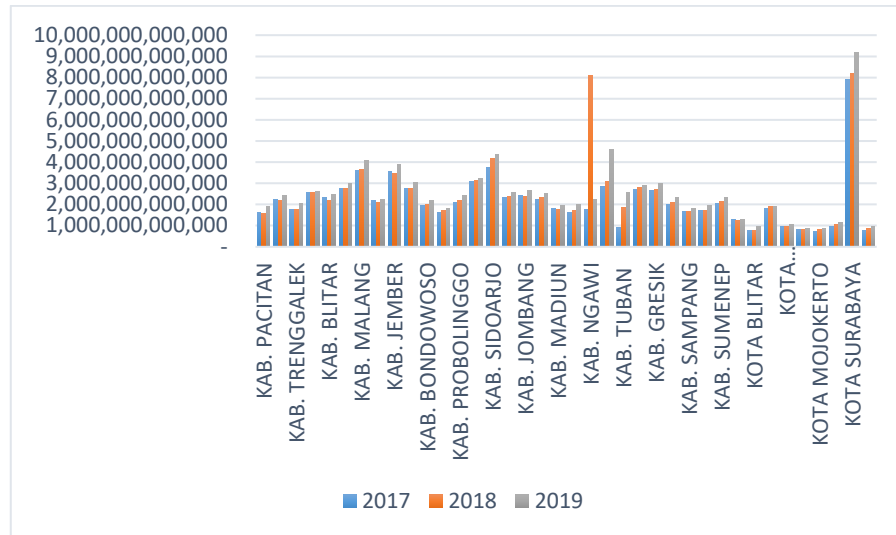
**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengetahui kemampuan model dalam merefleksikan perubahan variabel dependen. *R-squared* metode model efek tetap adalah 0,997691 atau 99,76% yang berarti bahwa variabel bebas dalam model (termasuk pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan) dapat menjelaskan varians variabel IPG dengan 99.76%, dan sisanya 0.24% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap IPG**

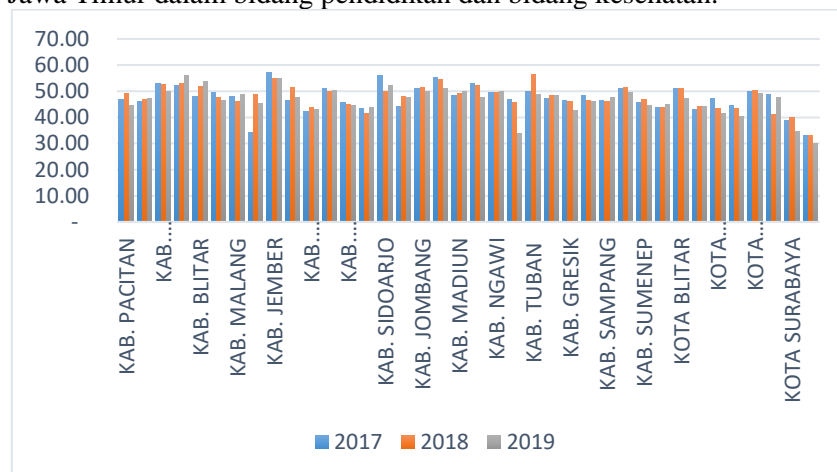
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab dan tugas yang terkait dengan layanan kesehatan dasar, layanan pendidikan dan budaya, pertahanan, dan lain-lain. Tugas tersebut memerlukan perencanaan, penerapan pembiayaan, monitoring dan evaluasi, serta pemeliharaan. Pemerintah dalam rangka mengelola anggaran khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, harus mengetahui realisasi pendapatan pemerintah yang setiap tahun ke tahun cenderung meningkat. Dalam data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, semua kabupaten/kota menyampaikan laporan realisasi APBD.





Gambar 4. Realisasi Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2019  
(Sumber: DJPK 2021)

Berdasarkan Gambar 4, realisasi pendapatan yang terbesar dicapai oleh Kota Surabaya, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan realisasi pendapatan terendah adalah Kota Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota Pasuruan. Selanjutnya digambarkan proporsi realisasi pendapatan daerah tahun 2017-2019 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam bidang pendidikan dan bidang kesehatan.



Gambar 5. Proporsi Realisasi Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2019  
(Sumber: DJPK 2021)

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang belanja daerah, pengertian belanja daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai penurunan nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dibagi menjadi dua kategori, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dialokasikan langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang dialokasikan secara tidak langsung, seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Belanja daerah bertujuan untuk memajukan kemakmuran suatu daerah dan kemakmuran rakyatnya, sehingga semakin tinggi pendapatan daerah maka daerah tersebut dapat dan mandiri membiayai belanja daerahnya

Berdasarkan Gambar 5, proporsi realisasi belanja bidang pendidikan dan kesehatan terhadap total realisasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah cenderung berfluktuasi.

Pada tahun 2017-2019 proporsi realisasi belanja bidang pendidikan dan kesehatan paling rendah adalah Kota Batu sebesar 33,10%, 33,14% dan 30,04%. Sedangkan pada tahun 2017-2019 realisasi belanja bidang pendidikan dan kesehatan paling terbesar adalah Kabupaten Jember sebesar 57,1%, Kabupaten Tuban sebesar 56,28%, dan Kabupaten Tulungagung sebesar 56,10%.

Kontribusi pemerintah dalam pembangunan manusia dapat dilihat dari proporsi pengeluaran pemerintah, dalam hal ini sektor pendidikan dan kesehatan yang telah mencapai belanja daerah. Dalam memajukan pembangunan suatu daerah dengan memperhatikan jenis kelamin, peran pemerintah dalam mengalokasikan belanja daerah untuk bidang pendidikan dan kesehatan sangat penting. Dengan mengamati seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hidup laki-laki dan perempuan. Dari hasil analisis regresi penelitian ini terlihat bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPG bidang pendidikan dan kesehatan, dan arah koefisiennya bertanda negatif. Hal ini karena pemerintah merealisasikan anggaran belanja pada jenis belanja tidak langsung. Sehingga upaya tersebut tidak akan berpengaruh pada perkembangan gender.

Persentase belanja pemerintah daerah bidang pendidikan dan kesehatan merupakan persentase terhadap total belanja daerah kabupaten/kota tahun 2017-2019. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan berdampak kecil pada IPG. Sehingga data pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan sebaiknya dipisahkan. Di sisi lain, mungkin juga disebabkan alokasi belanja daerah di bidang pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah untuk jenis belanja yang tidak mempengaruhi pembangunan gender. Meskipun Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan PUG secara ideal, akan tetapi alokasi belanja yang responsif gender belum optimal di sektor pendidikan dan kesehatan. Seharusnya pemerintah menyediakan anggaran untuk jenis-jenis pengeluaran yang langsung mempengaruhi pembangunan gender, guna memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan.

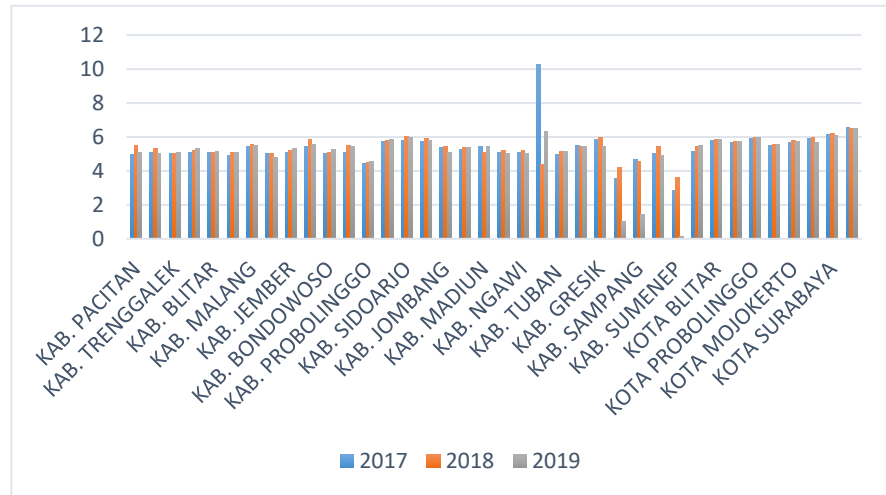
### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPG**

Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kegiatan ekonomi yang akan berdampak pada kesetaraan gender. Dengan adanya peningkatan kesempatan kerja dan produktivitas peserta akan mendorong perluasan pasar. Maka akan mendorong efektifitas ekonomi serta meningkatkan keterlibatan ekonomi laki-laki dan perempuan. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya investasi sarana dan prasarana. Investasi dan pembangunan pasar kerja akan mengakibatkan perempuan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga akan mengurangi kesenjangan gender dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Apabila pendapatan meningkat, kesenjangan gender dalam bidang pendidikan dan kesehatan akan menurun (Padang, Anis, and Ariusni 2019).

Menurut data BPS Provinsi Jawa Timur, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, tingkat pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Probolinggo sebesar 4,46%, dan tingkat pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Bojonegoro sebesar 10,25%. Tingkat pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2018 adalah Kabupaten Sumenep sebesar 3,63%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Batu sebesar 6,50%. Pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2019 adalah Kabupaten Bangkalan sebesar 1,03%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sama dengan tahun 2018 yaitu Kota Batu sebesar 6,50%.

Pemerintah mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender serta memberdayakan perempuan, terutama di bidang ekonomi. Melalui berbagai upaya, seperti menggerakkan seluruh sektor ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren

pertumbuhan yang positif yaitu mencapai 5,46 pada tahun 2017. Namun dari segi tingkat pemanfaatannya dinilai masih kurang berkualitas. Hal ini mencerminkan dari pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai belum mampu mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan, pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2017, Koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan adalah 0,396 yang dianggap sebagai ketimpangan pendapatan, namun tidak berubah seiring dengan perbaikan atau kemunduran situasi (BPS dan Kemenppa 2011).



**Gambar 6. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2019**  
(Sumber: BPS 2021)

Selain masalah ketimpangan pendapatan, juga terdapat masalah distribusi belanja yang kurang memadai untuk belanja publik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup warga di daerah tersebut. Penyediaan dari sarana hingga prasarana pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam pengalokasian belanja publik. Memungkinkan masyarakat untuk menggunakan fasilitas dan layanan dasar untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Distribusi belanja daerah sangat mempengaruhi keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan manusia melalui pelayanan dasar untuk masyarakat.

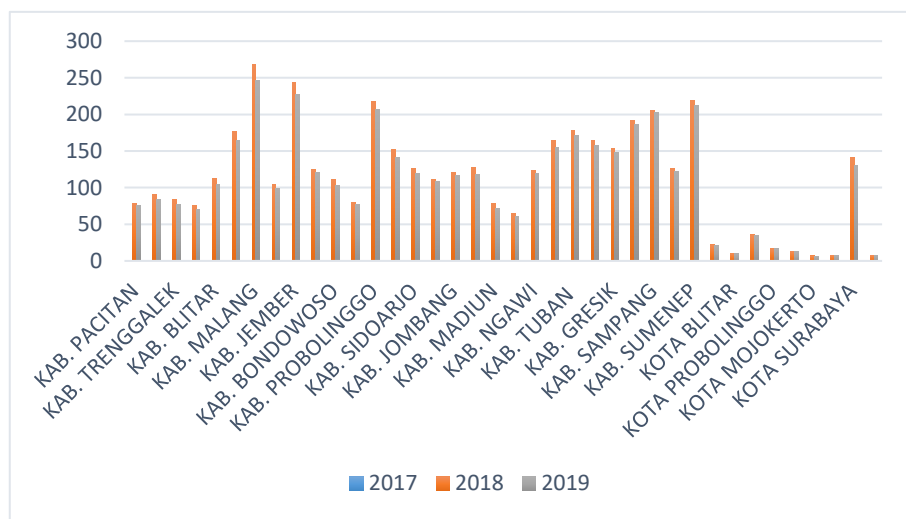
Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdampak positif dan tidak signifikan terhadap IPG. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan kesejahteraan masyarakat belum berdampak pada pembangunan gender yang mendorong kesetaraan gender. Maka diperlukan berbagai program serta kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh pada peningkatan pembangunan gender, khususnya kesetaraan dan keadilan gender. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Novtaviana 2020), dimana dalam hasil penelitiannya variabel IPG memiliki variabel secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan nilai probabilitas 0.0000 dan nilai hitung sebesar 8.301440. Selain itu, penelitian (Farooq *et al.* 2020) menunjukkan bahwa disparitas gender (rasio partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki) memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota OKI. Artinya semakin banyak disparitas gender (berkurangnya ketidaksetaraan gender) yang akan meningkatkan perekonomian di negara-negara OKI.

### Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap IPG

Menurut data BPS Provinsi Jawa Timur, tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami penurunan secara drastis. Selama periode (2017-2019) tingkat kemiskinan turun dari 4.617,01 ribu jiwa (11,7 %) menjadi 4.112,25 ribu jiwa (10,37%), pada tahun 2019 turun lagi menjadi 4.332,59 ribu jiwa (10,98%). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dapat terealisasi dan berjalan semakin baik. Pemerintah daerah terus melakukan reformasi perlindungan sosial melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial. Selain itu, pemerintah melakukan pemutakhiran data kemiskinan agar kebijakan dan program yang dilakukan dapat tepat sasaran.

Penetapan beberapa program dan kegiatan dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan dengan memperkuat kelembagaan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 terdapat beberapa program dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan sebagai berikut (a) program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; (b) program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA); (c) program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat; dan (d) program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Permasalahan yang terjadi dalam penanggulangan kemiskinan secara umum adalah besarnya data jumlah penduduk dalam garis kemiskinan. Data penduduk miskin harus terus diperbarui, agar penyaluran program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran dan berjalan efektif.



Gambar 7. Jumlah Penduduk Miskin di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2019 (Sumber: BPS 2021a)

Sering kali banyak *stereotype* yang terdapat pada masyarakat. *Stereotype* merupakan gambaran suatu individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan realitas empiris yang ada. Hal ini seperti tugas mencari nafkah adalah laki-laki. Berbeda dengan tugas perempuan yang dianggap hanya terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan keluarga. Perempuan telah melalui proses marginalisasi atau proses peminggiran, sehingga akan berpengaruh terhadap kemiskinan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga keadilan gender tanpa diskriminasi. Indonesia menandatangani Konvensi CEDAW dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB bagi perempuan pada tanggal 29 Juli 1980 di Kopenhagen pada 29 Juli 1980. Selain itu, hasil konvensi tersebut membuat pemerintah meratifikasi dengan membatasi ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada 24

Juli 1984. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setuju untuk melaksanakan Deklarasi Milenium dari Tujuan Pembangunan Milenium tepatnya pada tahun 2000. Salah satu tujuan dari Tujuan Pembangunan Milenium adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memberdayakan perempuan. Tujuan Pembangunan Milenium berakhir pada September 2015, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diidentifikasi sebagai agenda pembangunan. Salah satu tujuannya adalah tercapainya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan serta anak perempuan (BPS dan Kemenppa 2016).

Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPG. Maka penurunan tingkat kemiskinan cenderung menurunkan ketimpangan gender dalam pendidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan secara langsung mempengaruhi pembangunan gender. Hal ini karena faktor kemiskinan menghalangi antara laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh hak yang sama, kesempatan dalam partisipasi, dan kendali atas pembangunan. Ketidakadilan ini dapat menghambat proses perkembangan gender suatu negara. Hasil ini sejalan dengan penelitian Putri (2016), yang dilakukan di Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe, dan Subulussalam. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa beberapa variabel analisis regresi dan IPG berpengaruh positif signifikan terhadap garis kemiskinan.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPG. Dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanjanya pada jenis belanja tidak langsung, sehingga belum memberikan dampak terhadap pembangunan gender. Pelaksanaan PUG di Provinsi Jawa Timur sudah berjalan ideal, akan tetapi belum diikuti dengan optimalisasi alokasi belanja di bidang pendidikan dan kesehatan yang responsif terhadap gender.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPG, namun pertumbuhan ekonomi masih berpengaruh negatif. Hal ini karena peningkatan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat masih belum memberikan pengaruh terhadap pembangunan gender yang mendorong kesetaraan gender.

Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPG. Penurunan tingkat kemiskinan cenderung dapat mengurangi ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan. Tingkat kemiskinan dapat dikatakan dapat memberikan dampak langsung terhadap pembangunan gender. Hal ini karena faktor kemiskinan dapat menghambat akses pemberian kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh akses, kesempatan partisipasi, dan kontrol atas pembangunan. Sehingga dapat menghambat proses pembangunan gender suatu negara.

### **Rekomendasi**

Pentingnya pembangunan gender dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemerintah dalam upaya menciptakan kesetaraan gender harus memperhatikan dan mengalokasikan pengeluarannya pada bidang-bidang yang dapat memberikan dampak secara langsung terhadap IPG. Dalam hal ini bidang yang dimaksud adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Sedangkan dalam hal mengatasi masalah tingkat kemiskinan diperlukan beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kelemahan seperti keterbatasan data dalam penelitian. Untuk perbaikan selanjutnya dan memperdalam hasil, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (a) data penelitian menggunakan periode yang lebih panjang, sehingga dapat memberikan gambaran pengaruh pengeluaran

pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPG; (b) perlunya meneliti pengaruh dari bidang lain selain variabel yang terdapat dalam penelitian ini; dan (c) pentingnya dilakukan penelitian pembangunan gender di tingkat kecamatan, agar dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi masyarakat.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain BPS Provinsi Jawa Timur dan Dosen Fakultas Ekonomi selaku pembimbing. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungannya keikutsertaan dalam naskah/penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azuri, Dila Fitriani, Zulhanif, and Resa Septiani Pontoh. 2016. "Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Berdasarkan Pembangunan Manusia Berbasis Gender Menggunakan Bisecting K-Means." *Peran Penelitian Ilmu Dasar Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan*.
- Bappenas, Kementerian P P N. 2018. "Kedeputian Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas."
- BPS. 2021a. "Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Jawa Timur." Jakarta.
- BPS. 2021. "Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010." Jakarta.
- BPS, and Kemenppa. 2011. "Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011."
- Kemenppa and BPS. 2016. "Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016."
- DJPK. 2021. "Realisasi APBD Per Fungsi." Jakarta.
- Farooq, Fatima, Zulkornain Yusop, Imran Sharif Chaudhry, and Robina Iram. 2020. "Assessing the Impacts of Globalization and Gender Parity on Economic Growth: Empirical Evidence from OIC Countries," 6904–17.
- Ilyas, Nirwan. 2012. "Analisis Data Panel Model Efek Acak Pada Data Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Matematika, Statistika & Komputasi* 8 (2): 110–30.
- Ismail, Kristina, Eka Yulyana, and Evi Priyanti. 2020. "Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak ( Studi Implementasi Kebijakan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang )" 6 (November): 831–48.
- Kahang, Merang, Muhammad Saleh, and Rachmad Budi Suharto. 2017. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur." *Forum Ekonomi* 18 (2): 130–40. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/863>.
- Kemenppa, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. "Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020."
- Martiany, Dina. 2011. "Implementasi Pengarusutamaan Gender Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender." *Aspirasi* 2 (2): 121–36.
- Munandar, Aris. 2017. "Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 8 (1): 59–67. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/246>.
- Novtaviana, Winda. 2020. "Pengaruh Indeks Pembangunan Gender Dan Indeks

Pemberdayaan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Di Indonesia Tahun 2014-2018.” *Skripsi*.

Padang, Desi Mariaty, Ali Anis, and Ariusni. 2019. “Analisis Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 1 (3): 969–76.

Rahmawati, Farida, and Zulfa Miftha’ul Hidayah. 2020. “Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)* 7 (1): 110.

UNDP. 2020. “Background on the Goals,” 2020. [undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/background/](https://undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/background/).